



**RINGKASAN
LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
(RLPPD)
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
TAHUN 2018**

I. PENDAHULUAN

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya, pada kesempatan ini kami dapat menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018 yang merupakan amanat konstitusional Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pasal 69 ayat (1) yaitu Kepala Daerah wajib menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD).

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018 ini merupakan tahun terakhir dari implementasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2013-2018, dengan harapan dapat memberikan gambaran mengenai pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah mencakup urusan konkuren, tugas pembantuan dan tugas umum pemerintahan dengan tujuan meningkatkan citra dan wibawa pemerintahan daerah. Tahun 2018 terjadi penggantian Kepala Daerah yaitu Gubernur Prof. Dr. Awang Faroek Ishak, Penjabat Gubernur Ir. Restuardy Daud, M.Sc dan terakhir Gubernur dan Wakil Gubernur Terpilih periode 2018-2023 Dr. Ir. Isran Noor, M.Si dan H. Hadi Mulyadi, S.Si, M.Si yang dilantik pada tanggal 1 Oktober 2018.

Dalam kesempatan ini Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya dan terima kasih yang tak terhingga kepada seluruh pihak yang telah membantu dan berpartisipasi aktif dalam penyusunan LPPD ini. Semoga Allah SWT, melimpahkan Rahmat, Hidayah, Perlindungan dan PetunjukNya kepada Kita semua Terima kasih. Demikian LPPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018 ini disampaikan.

A. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah .
2. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada DPRD, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat .
3. Peraturan Pemerintah No. 6 tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah .
4. Permendagri No. 73 tahun 2009 tentang Tatacara Pelaksanaan EKPPD .
5. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor :120.04/9803/OTDA Tgl 17 Desember 2018 Tentang Pedoman Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2018

B. GAMBARAN UMUM DAERAH

Daerah Kalimantan Timur yang terdiri dari luas wilayah administrasi Provinsi Kalimantan Timur 16.732.065 Ha. terdiri dari daratan seluas 12.638.931 Ha dan perairan darat seluas 95.761 Ha, Terletak antara 20 33' Lintang Utara (LU)



dan 20 25' Lintang Selatan (LS), 1130 44' Bujur Timur (BT) dan 1190 00' Bujur Timur (BT).

Dari segi administrasi pemerintahan, Provinsi Kalimantan Timur terbagi menjadi 7 (Tujuh) kabupaten yaitu Berau, Kutai Kartanegara, Kutai Timur, Kutai Barat, Paser, Penajam Paser Utara, dan Mahakam Ulu (DOB) serta memiliki 3 (tiga) kota yaitu Balikpapan, Bontang, dan Samarinda.

Kalimantan Timur termasuk provinsi yang tidak padat penduduk, karena populasi penduduk Kalimantan Timur hingga data terakhir tahun 2018 berjumlah 3.552.191 jiwa. Jumlah keseluruhan penduduk Kalimantan Timur yang dihitung berdasarkan Komposisi rasio jenis kelamin yang terdiri dari laki-laki sebanyak 52% atau 1.847.191 Jiwa dan Penduduk Perempuan sebanyak 48% atau 1.705.000 Jiwa.

II. RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) TAHUN 2013-2018

1. VISI DAN MISI

a. VISI

Visi Gubernur dan Wakil Gubernur 2013-2018 sebagai berikut:

**“MEWUJUDKAN KALTIM SEJAHTERA YANG MERATA DAN
BERKEADILAN BERBASIS AGROINDUSTRI DAN ENERGI RAMAH
LINGKUNGAN”**

b. MISI

- 1) Mewujudkan kualitas sumber daya manusia Kaltim yang mandiri dan berdaya saing tinggi.
- 2) Mewujudkan daya saing ekonomi yang berkerakyatan berbasis sumber daya alam dan energi terbarukan.
- 3) Mewujudkan infrastruktur dasar yang berkualitas bagi masyarakat secara merata.
- 4) Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang profesional, transparan dan berorientasi pada pelayanan publik.
- 5) Mewujudkan kualitas lingkungan yang baik dan sehat serta berperspektif perubahan iklim.

III. PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN

Dalam pelaksanaan penyelenggaraan urusan wajib dan urusan pilihan sebagaimana yang diamanatkan pada Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur melalui RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013-2018 yang dituangkan kedalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) setiap tahunnya dengan memuat kebijakan pembangunan maupun kebijakan APBD yang diarahkan untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Kalimantan Timur merupakan jabaran dari RPJMD Provinsi Kalimantan Timur 2013-2018.



Pada RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018 Prioritas Pembangunan tetap mengacu pada prioritas pembangunan RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013 – 2018. Prioritas pembangunan dalam penyusunan Program Pembangunan disesuaikan dengan isu strategis yang dihadapi pada tahun 2018.

Berdasarkan analisis faktor-faktor tersebut, maka pada RKPD 2018 ditetapkan dengan tema :

“Memacu Investasi dan Infrastruktur Untuk Pertumbuhan & Pemerataan ”

Dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, berikut diuraikan capaian kinerja berdasarkan Urusan Pemerintah Daerah Kalimantan Timur yang meliputi Urusan Wajib dan Urusan Pilihan, sebagai berikut:

A. Urusan Wajib yang dilaksanakan :

a. Urusan Pendidikan

1. Pendidikan Luar Biasa (PLB) jenjang SD/MI pada tahun 2018 capaian kinerja 96,16 %.
2. Pendidikan Luar Biasa (PLB) jenjang SMP/MTs pada tahun 2018 capaian kinerja 95,21 %.
3. Pendidikan Luar Biasa (PLB) jenjang SMA/SMK/MA pada tahun 2018 capaian kinerja 95,02 %.
4. Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/Paket C pada tahun 2018 capaian kinerja 94,18 %.
5. Angka Kelulusan (AL) SMA/SMK/MA pada tahun 2018 capaian kinerja 98,27 %.
6. Angka Putus Sekolah (APS) SMA/SMK/MA pada tahun 2018 capaian kinerja 0,02 %.
7. Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA pada tahun 2018 capaian kinerja 96,72 %.
8. Pembinaan Guru Jenjang SD/MI yang telah memenuhi kualifikasi dan kompetensi pada tahun 2018 capaian kinerja 95,68 % .
9. Pembinaan Guru Jenjang SMP/MTs yang telah memenuhi kualifikasi dan kompetensi pada tahun 2018 capaian kinerja 95,54 %.
10. Pembinaan Guru Jenjang SMA/SMK/MA yang telah memenuhi kualifikasi dan kompetensi pada tahun 2018 capaian kinerja 97,02 %.
11. Tersedia Fasilitasi dan Asistensi Pengelolaan Penjaminan Mutu Pendidikan.

b. Urusan Kesehatan

Urusan Kesehatan yang ditangani pada 10 Kabupaten/Kota dalam tahun 2018, sebagai berikut :

1. Cakupan Komplikasi kebidanan yang ditangani dengan capaian kinerja 84,59 %.
2. Cakupan Pertolongan Persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan dengan capaian kinerja 93,07 %
3. Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI) dengan capaian kinerja 85,95 %.
4. Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan sesuai standar dengan capaian kinerja 100 %.
5. Cakupan Penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA dengan capaian kinerja 89,31 %.
6. Cakupan Penemuan penanganan penderita penyakit DBD dengan capaian kinerja 99,64 %.



7. Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin dengan capaian kinerja 73,32 %.
8. Cakupan kunjungan bayi dengan capaian kinerja 90,10 %.

c. Urusan Lingkungan Hidup

Urusan Lingkungan Hidup yang ditangani pada 10 Kabupaten/Kota dalam tahun 2018, sebagai berikut :

1. Pemantauan Pencemaran Udara dengan capaian kinerja 100 % terhadap 10 kabupaten/kota se Kaltim.
2. Kebersihan dengan capaian kinerja 70,16 %.
3. Tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk dengan capaian kinerja 2,53 %.
4. Penegakkan Hukum Lingkungan dengan capaian kinerja 96,92 %.

d. Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

1. Prosentase panjang jalan Provinsi dalam kondisi mantap pada tahun 2018 dengan capaian kinerja 72,85 %.
2. Prosentase Rumah Tangga Bersanitasi yang ditangani pada 10 Kab/Kota dalam tahun 2018 dengan capaian kinerja 77,93 %.
3. Prosentase Kawasan Kumuh yang ditangani pada 10 Kab/Kota dalam tahun 2018 dengan capaian kinerja 2,24 %.
4. Prosentase Ruang Terbuka Hijau per satuan wilayah yang ditangani pada 10 Kab/Kota dalam tahun 2018 dengan capaian kinerja 22,03 %.

e. Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Urusan Perumahan yang ditangani pada 10 Kabupaten/Kota dalam tahun 2018, sebagai berikut :

1. Rumah Tangga Pengguna Air Bersih dengan capaian kinerja 74,39 %.
2. Rumah Layak Huni dengan capaian kinerja 78,24 %.

h. Urusan Kepemudaan & Olahraga

Urusan Kepemudaan Olahraga yang ditangani pada 10 Kabupaten/Kota dalam tahun 2018, sebagai berikut :

1. Gelanggang/Balai remaja (selain milik swasta) dengan capaian kinerja 0,20 %.
2. Lapangan Olahraga dengan capaian kinerja 1,44 %

i. Urusan Penanaman Modal

Alokasi Anggaran Dana Dekonsentrasi (DK) Tahun Anggaran 2018 yang diterima sebesar Rp. 549.456.000,- dengan realisasi anggaran Rp. 446.043.646,- dengan capaian 81,18 %.

j. Urusan Koperasi dan UMKM

Urusan Koperasi dan UMKM yang ditangani pada 10 Kabupaten/Kota dalam tahun 2018, sebagai berikut :

1. Koperasi Aktif di Provinsi Kalimantan Timur dengan capaian kinerja 61,80 %.
2. Usaha Mikro dan Kecil dengan capaian kinerja 96,08 %.

k. Urusan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil

Tersedianya data base kependudukan skala Provinsi yang dibuat 1 Tahun 2 kali dengan skalaper semester.

l. Urusan Ketenagakerjaan

1. Pelayanan kepesertaan jaminan sosial bagi pekerja/buruh dengan capaian kinerja 67,50 %.
2. Pencari kerja yang sudah ditempatkan dengan capaian kinerja 44,01 %.



m. Urusan Ketahanan Pangan

1. Telah dibuat regulasi ketahanan pangan .
2. Ketersediaan pangan utama yang ditangani pada 10 Kab/Kota dalam tahun 2018 dengan capaian kinerja 146.721,42 kg.

n. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

1. Partisipasi perempuan dalam lembaga pemerintah dengan capaian kinerja 41,35 %.
2. Partisipasi angkatan kerja perempuan dengan capaian kinerja 25,05 %.

o. Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

1. Prevalensi peserta KB aktif dengan capaian kinerja 76,12 %.
2. Rasio petugas lapangan KB/Penyuluh KB (PLKB/PKB) di setiap desa/kelurahan dengan capaian kinerja 1,38 %.

p. Urusan Perhubungan

Urusan Perhubungan yang ditangani pada 10 Kab/Kota dalam tahun 2018 untuk angkutan darat dengan capaian kinerja 55,78 %.

q. Urusan Komunikasi dan Informatika

1. Tersedianya website milik pemerintah daerah .
2. Jumlah Pameran/Expo selama tahun 2018 sebanyak 23 kali.

r. Urusan Pertanahan

Urusan Pertanahan yang ditangani pada 10 Kab/Kota dalam tahun 2018 untuk luas lahan bersertifikat dengan capaian kinerja 25,17 %.

s. Urusan Trantibumlinmas

1. Kegiatan pembinaan politik daerah mencapai 36 kegiatan.
2. Kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP mencapai 26 kegiatan.

t. Urusan Fungsi Penunjang

Urusan Fungsi Penunjang selama tahun 2018, sebagai berikut :

1. Tersedianya 52 Sistem Informasi Manajemen Pemda.
2. Memiliki 20 kasus Tapal Batas.
3. Tersedianya Dokumen Perencanaan RPJPD.
4. Tersedianya Dokumen Perencanaan RPJMD.
5. Tersedianya Dokumen Perencanaan RKPD.
6. Penjabaran Program RPJMD dalam RKPD pada tahun 2018 dengan capaian kinerja 73.83 %.

u. Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang ditangani pada 10 Kab/Kota dalam tahun 2018 untuk jumlah PKK aktif dengan capaian kinerja 99,72 %.

v. Urusan Sosial

1. Jumlah Sarana Sosial (Panti Asuhan, Panti Jompo dan Panti Rehabilitasi) sebanyak 128 panti.
2. Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang memperoleh bantuan sosial dengan capaian kinerja 100 %.

w. Urusan Budaya

1. Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya sebanyak 84 kali.
2. Sarana Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya berjumlah 6 buah.

x. Urusan Statistik

Tersedianya buku "Provinsi dalam Angka" dan buku "PDRB Provinsi"

y. Urusan Kearsipan

1. Penerapan pengelolaan arsip secara baku dengan capaian kinerja 100 %.
2. Kegiatan peningkatan SDM pengelola kearsipan sebanyak 2 kegiatan.



z. Urusan Perpustakaan

1. Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah dengan capaian kinerja 44,87 %.
2. Jumlah pengunjung perpustakaan selama 1 (satu) tahun dengan capaian kinerja 17,48 Orang.

B. Urusan Pilihan yang dilaksanakan

a. Urusan Kelautan dan Perikanan

1. Produksi perikanan yang ditangani pada 10 Kab/Kota dalam tahun 2018 mencapai 98,71 Ton.
2. Nilai ekspor hasil perikanan dibanding target daerah dengan capaian kinerja 102,34 , melebihi target yang telah ditetapkan sejak Tahun 2013.
3. Jumlah konsumsi ikan yang ditangani pada 10 Kab/Kota dalam tahun 2018 dengan capaian kinerja 118,68 %.

b. Urusan Pertanian

1. Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per Ha yang ditangani pada 10 Kab/Kota dalam tahun 2018 mencapai 7,11 Ton .
2. Nilai kontribusi dari sektor pertanian terhadap PDRB mencapai 7,88 %.

c. Urusan Kehutanan

1. Luas rehabilitasi hutan dan lahan kritis dibanding dengan luas total hutan dan lahan kritis Tahun 2018 mencapai 0,51 %.
2. Luas kerusakan kawasan hutan dibanding luas kawasan hutan Tahun 2018 mencapai 1,49 %.

d. Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral

1. Pertambangan tanpa ijin dibanding penanganannya Tahun 2018 mencapai 84,08 % . (seluruh area pertambangan liar langsung ditertibkan).
2. Nilai kontribusi sektor pertambangan terhadap PDRB, mencapai 46,35 %.

e. Urusan Pariwisata

1. Jumlah kunjungan wisatawan pada 10 Kab/Kota rata-rata mencapai 7.057.105 wisatawan.
2. Jumlah kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB mencapai 0,97 %.

f. Urusan Industri

1. Nilai kontribusi sektor industri terhadap PDRB mencapai 18,27 %.
2. Jumlah pertumbuhan industri pada 10 Kab/Kota rata-rata mencapai 4,29 %.

g. Urusan Perdagangan

1. Nilai kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB mencapai 4,92 %.
2. Nilai ekspor 2018 dibanding nilai impor 2018 terdapat ekspor bersih perdagangan sebesar 13,798 US\$.

h. Urusan Transmigrasi, dengan;

Urusan Transmigrasi yang ditangani pada 10 Kab/Kota dalam tahun 2018 terhadap transmigrasi swakarsa dengan capain kinerja 50 %.

IV. TUGAS PEMBANTUAN

Penyelenggaraan Tugas Pembantuan di Provinsi Kalimantan Timur mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan. Penyelenggaraan Tugas Pembantuan yang diterima oleh Provinsi Kalimantan Timur tahun 2018.

Pemerintah memberikan bantuan Tugas Pembantuan kepada Pemerintah Daerah melalui Kementerian yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah Provinsi



Kalimantan Timur, dengan rincian program & kegiatan tugas pembantuan pada Perangkat Daerah.

Pemerintah memberikan dana Tugas Pembantuan kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur melalui Kementerian/Lembaga Tahun Anggaran 2018, yaitu sebagai berikut :

- 1) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
- 2) Kementerian Pertanian
- 3) Kementerian Sosial
- 4) Kementerian Ketenagakerjaan
- 5) Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.

A. Tugas Pembantuan dan Dekonsentrasi yang diterima dan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah.

a. Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Holtikultura

Alokasi Anggaran Dana Tugas Pembantuan (TP) Tahun Anggaran 2018 yang diterima sebesar Rp. 87.421.661.000,- dengan realisasi anggaran Rp. 85.064.974.793,- dengan capaian 97,30 %.

b. Dinas Perkebunan

Alokasi Anggaran Dana Tugas Pembantuan (TP) Tahun Anggaran 2018 yang diterima sebesar Rp. 6.809.357.000,- dengan realisasi anggaran Rp. 5.650.195.903,- dengan capaian 82,98 %.

c. Dinas Peternakan

Alokasi Anggaran Dana Tugas Pembantuan (TP) Tahun Anggaran 2018 yang diterima sebesar Rp. 4.552.541.000,- dengan realisasi anggaran Rp. 4.374.306.006,- dengan capaian 96,08 %.

d. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Alokasi Anggaran Dana Dekonsentrasi (DK) Tahun Anggaran 2018 yang diterima sebesar Rp. 6.805.810.000,- dengan realisasi anggaran Rp. 6.324.158.635,- dengan capaian 92,94 %.

e. Dinas Sosial

Alokasi Anggaran Dana Tugas Pembantuan (TP) Tahun Anggaran 2018 yang diterima sebesar Rp. 2.676.844.000,- dengan realisasi anggaran Rp. 2.489.249.600,- dengan capaian 92,99 %.

f. Dinas Perikanan & Kelautan

Alokasi Anggaran Dana Dekonsentrasi (DK) Tahun Anggaran 2018 yang diterima sebesar Rp. 3.115.918.000,- dengan realisasi anggaran Rp. 3.084.098.333,- dengan capaian 98,98 %.

g. Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat

Alokasi Anggaran Dana Dekonsentrasi (DK) Tahun Anggaran 2018 yang diterima sebesar Rp. 1.143.612.000,- dengan realisasi anggaran Rp. 1.127.191.322,- dengan capaian 98,56 %.

B. Dekonsentrasi

Pemerintah memberikan dana Dekonsentrasi kepada Pemerintah Daerah melalui Kementerian yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur pada Tahun 2018 dengan pagu sebesar Rp. 129.746.401.000,- dan realisasi anggaran sebesar Rp. 120.382.131.837,- capaian persentase 92,78 %.

a. Sekretariat Daerah

1. Program dan Kegiatan

Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur pada Tahun 2018 mendapat 1 (satu) DIPA Dekonsentrasi Program Bina Administrasi



kewilayahan dengan kegiatan Penyelenggaraan Hubungan Pusat dan Daerah serta Kerja Sama Daerah.

2. Instansi Pemberi Dekonsentrasi

Instansi Pemberi Dekonsentrasi adalah Kementerian Dalam Negeri.

3. Perangkat Daerah yang Melaksanakan Dekonsentrasi

Perangkat Daerah Pelaksana Dekonsentrasi adalah Biro Pemerintahan, Perbatasan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

4. Alokasi Anggaran dan Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Alokasi Anggaran Dana Dekonsentrasi (DK) Tahun Anggaran 2018 yang diterima sebesar Rp. 250.556.000,- dengan realisasi anggaran Rp. 203.102.500,- dengan capaian 81,06 %.

b. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

1. Program perencanaan pembangunan nasional, pagu Rp. 1.006.291.000,- , realisasi Rp. 957.709.636,- dengan capaian kinerja 95,17 %.
2. Program Pembangunan Daerah Tertinggal, pagu Rp. 203.140.000,- , realisasi Rp. 201.499.500,- dengan capaian kinerja 99,19 %.

c. Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Holtikultura

1. Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat, pagu Rp. 4.301.550.000,- , realisasi Rp. 4.229.959.729,- dengan capaian kinerja 98,34 %.
2. Program Peningkatan Produksi dan Nilai Tambah Hortikultura, pagu Rp. 2.554.184.000,- , realisasi Rp. 2.540.215.200,- dengan capaian kinerja 99,45 %.
3. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian, pagu Rp. 1.035.940.000,- , realisasi Rp. 902.857.525,- dengan capaian kinerja 87,15 %.
4. Program Peningkatan Penyuluhan dan Pelatihan Pertanian, pagu Rp. 5.305.530.000,- , realisasi Rp. 5.135.779.590,- dengan capaian 96,80 %.
5. Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Hasil Tanaman Pangan, pagu Rp. 3.605.694.000,- , realisasi Rp. 3.541.273.850,- dengan capaian 98,21 %.

d. Dinas Perkebunan

Alokasi Anggaran Dana Dekonsentrasi (DK) Tahun Anggaran 2018 yang diterima sebesar Rp. 1.577.500.000,- dengan realisasi anggaran Rp. 1.467.531.700,- dengan capaian 93,03 %.

e. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM

1. Program Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecil dan Menengah, pagu Rp. 1.960.000.000,- , realisasi Rp. 1.879.634.600,- dengan capaian kinerja 95,90 %.
2. Program Peningkatan Daya Saing UMKM dan Koperasi, pagu Rp. 1.671.000.000,- , realisasi Rp. 1.568.539.700,- dengan capaian kinerja 93,87 %.
3. Program Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri, pagu Rp. 1.256.048.000,- , realisasi Rp. 1.248.124.350,- dengan capaian kinerja 99,37 %.
4. Program Peningkatan Perdagangan Luar Negeri, pagu Rp. 520.767.000,- , realisasi Rp. 504.586.950,- dengan capaian kinerja 96,89 %.



f. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, pagu Rp. 368.116.000,- , realisasi Rp. 336.681.620,- dengan capaian kinerja 91,46 %.
2. Program Pendidikan Dasar dan Menengah, pagu Rp. 4.836.214.000,- , realisasi Rp. 4.464.194.015,- dengan capaian kinerja 92,31 %.
3. Program Guru dan Tenaga Kependidikan, pagu Rp. 1.601.480.000,- , realisasi Rp. 1.524.283.000,- dengan capaian kinerja 95,18 %.

g. Dinas Kesehatan

1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Kesehatan, pagu Rp. 2.096.699.000,- , realisasi Rp. 1.956.285.471,- dengan capaian kinerja 93,30 %.
2. Program Pembinaan Kesehatan Masyarakat, pagu Rp. 10.875.806.000,- , realisasi Rp. 9.518.863.443,- dengan capaian kinerja 87,52%.
3. Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan, pagu Rp. 2.585.223.000,- , realisasi Rp. 2.126.263.962,- dengan capaian kinerja 82,25 %.
4. Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, pagu Rp. 4.653.039.000,- , realisasi Rp. 4.053.441.880,- dengan capaian kinerja 87,11 %.
5. Program Kefarmasian dan Alat Kesehatan, pagu Rp. 1.812.271.000,- , realisasi Rp. 1.518.317.211,- dengan capaian kinerja 83,78 %.
6. Program Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan (PPSDMK), pagu Rp. 4.932.856.000,- , realisasi Rp. 4.401.964.034,- dengan capaian kinerja 89,24 %.

h. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

1. Program Pengembangan Hubungan Industrial dan Peningkatan Jaminan Sosial Tenaga Kerja, pagu Rp. 1.142.418.000,- , realisasi Rp. 1.135.961.017,- dengan capaian kinerja 99,43 %.
2. Program Perlindungan Tenaga Kerja dan Pengembangan Sistem Pengawasan Ketenagakerjaan, pagu Rp. 650.152.000,- , realisasi Rp. 647.665.000,- dengan capaian kinerja 99,62 %.
3. Program Peningkatan Kompetensi Tenaga Kerja dan Produktivitas, pagu Rp. 3.277.900.000,- , realisasi Rp. 3.275.961.000,- dengan capaian kinerja 99,94 %.

i. Dinas Sosial

1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Sosial, pagu Rp. 229.282.000,- , realisasi Rp. 220.023.300,- dengan capaian kinerja 95,96 %.
2. Program Pemberdayaan Sosial, pagu Rp. 2.175.274.000,- , realisasi Rp. 2.109.893.400,- dengan capaian kinerja 96,99 %.
3. Program Rehabilitasi Sosial, pagu Rp. 3.473.930.000,- , realisasi Rp. 3.388.762.800,- dengan capaian kinerja 97,57 %.
4. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial, pagu Rp. 4.980.328.000,- , realisasi Rp. 4.859.221.221,- dengan capaian kinerja 97,57 %.
5. Program Penanganan Fakir Miskin, pagu Rp. 2.971.264.000,- , realisasi Rp. 2.942.282.200,- dengan capaian kinerja 99,02 %.



j. Dinas Kehutanan

Alokasi Anggaran Dana Dekonsentrasi (DK) Tahun Anggaran 2018 yang diterima sebesar Rp. 1.578.925.000,- dengan realisasi anggaran Rp. 1.471.066.220,- dengan capaian 93,17 %.

k. Dinas Lingkungan Hidup

Alokasi Anggaran Dana Dekonsentrasi (DK) Tahun Anggaran 2018 yang diterima sebesar Rp. 654.618.000,- dengan realisasi anggaran Rp. 650.408.050,- dengan capaian 99,36 %.

l. Dinas Kelautan dan Perikanan

1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya KKP, pagu Rp. 700.000.000,- , realisasi Rp. 689.343.000,- dengan capaian kinerja 98,48 %.
2. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap, pagu Rp. 443.095.000,- , realisasi Rp. 428.567.775,- dengan capaian kinerja 96,72 %.
3. Program Pengelolaan Sumber Daya Perikanan Budidaya, pagu Rp. 532.650.000,- , realisasi Rp. 529.453.650,- dengan capaian kinerja 99,40 %.
4. Program Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, pagu Rp. 608.588.000,- , realisasi Rp. 605.415.000,- dengan capaian kinerja 99,48 %.
5. Program Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan, pagu Rp. 274.085.000,- , realisasi Rp. 274.035.908,- dengan capaian kinerja 99,98 %.
6. Program Pengelolaan Ruang Laut, pagu Rp. 557.500.000,- , realisasi Rp. 557.283.000,- dengan capaian kinerja 99,96 %.

m. Dinas Pariwisata

1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Pariwisata, Pagu Rp. 102.497.000,- , realisasi Rp. 98.389.100,- dengan capaian 95,99 %.
2. Program Pengembangan Kepariwisata, Pagu Rp. 2.357.000.000,- , realisasi Rp. 2.354.466.824,- dengan capaian 99,89 %.

n. Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Alokasi Anggaran Dana Dekonsentrasi (DK) Tahun Anggaran 2018 yang diterima sebesar Rp. 2.300.000.000,- dengan realisasi anggaran Rp. 2.113.677.868,- dengan capaian 91,90 %.

o. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

1. Program Pengembangan Perpustakaan, pagu Rp. 1.196.125.000,- , realisasi Rp. 1.094.074.107,- dengan capaian kinerja 91,47 %.
2. Program Penyelenggaraan Kearsipan Nasional, pagu Rp. 137.846.000,- , realisasi Rp. 124.494.168,- dengan capaian kinerja 90,31 %.

p. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Alokasi Anggaran Dana Dekonsentrasi (DK) Tahun Anggaran 2018 yang diterima sebesar Rp. 549.456.000,- dengan realisasi anggaran Rp. 446.043.646,- dengan capaian 81,18 %.



q. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa

Alokasi Anggaran Dana Dekonsentrasi (DK) Tahun Anggaran 2018 yang diterima sebesar Rp. 34.257.208.000,- dengan realisasi anggaran Rp. 30.561.246.019,- dengan capaian 89,21 %.

r. Dinas Pemuda dan Olahraga

Alokasi Anggaran Dana Dekonsentrasi (DK) Tahun Anggaran 2018 yang diterima sebesar Rp. 3.494.278.000,- dengan realisasi anggaran Rp. 3.405.643.669,- dengan capaian 97,46 %.

V. TUGAS UMUM PEMERINTAHAN

Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan meliputi :

- a. Kerjasama antar pemerintah/daerah.
- b. Kerjasama daerah dengan non pemerintah.
- c. Pembinaan Batas Wilayah.
- d. Pencegahan dan penanggulangan bencana.
- e. Pengelolaan kawasan khusus.
- f. Penyelenggaraan Ketentraman dan ketertiban umum.

A. Kerjasama Antar Daerah

Kerjasama Daerah ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, mengurangi kesenjangan pembangunan antar daerah, dan meningkatkan pelayanan umum kepada masyarakat melalui akselerasi ilmu dan teknologi, pemberdayaan potensi daerah dan melengkapi kebutuhan pembangunan dalam berbagai bidang, untuk itu Kalimantan Timur pada tahun 2018 melakukan 32 perjanjian kerjasama antar daerah.

B. Kerja Sama Daerah dengan non pemerintah/pihak ketiga

1. Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur juga melaksanakan kerjasama daerah dengan non pemerintah dalam kerangka optimalisasi penyelenggaraan pembangunan daerah terkait dengan pengelolaan potensi daerah dalam mengungkit nilai tambah dan nilai manfaat baik bagi Pemerintah daerah maupun masyarakat.
2. Kerjasama dengan pihak ketiga diarahkan kepada pemberdayaan dan pemanfaatan potensi daerah melalui upaya peningkatan investasi daerah yang dapat mendorong terwujudnya peningkatan perekonomian masyarakat, peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan peningkatan pelayanan publik, Tahun 2018 Provinsi Kalimantan Timur melakukan 7 kerjasama dengan non pemerintah/pihak ketiga.

C. Pembinaan batas wilayah.

Administrasi Wilayah di Provinsi Kalimantan Timur terbagi menjadi 10 Kabupaten/Kota, 103 Kecamatan, 196 Kelurahan dan 833 Desa. Masing-masing 3 Kota dan 7 Kabupaten tersebut adalah Kota Samarinda, Kota Balikpapan, Kota Bontang, Kabupaten Berau, Kabupaten Kutai Kartanegera, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, Kabupaten Paser, Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Mahakam Ulu.

Sampai dengan Maret tahun 2019 panjang batas yang telah disepakati dan yang masih dalam proses kesepakatan adalah sebagai berikut :

- Antar Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur panjang batas \pm 2.218.42 Km, telah disepakati sepanjang \pm 1.486,01 Km atau sebesar 66.99 % dan sisa yang harus diselesaikan sepanjang \pm 732.41 Km atau sebesar 33.01 %.



- Batas Wilayah Provinsi Kalimantan Timur dengan Provinsi lain sepanjang $\pm 1.803,72$ Km, telah sepakat $\pm 1219,90$ Km atau sebesar 67,63 % dan sisa yang harus diselesaikan sepanjang $\pm 583,82$ Km atau sebesar 32,37 %.
- Dari total panjang batas antar Kabupaten/Kota dan batas Provinsi tersebut sepanjang $\pm 4.023,35$ Km, telah dicapai kesepakatan sepanjang $\pm 2.707,38$ Km atau sebesar 67,29% dan yang masih dalam proses penyelesaian sepanjang $\pm 1.315,97$ Km atau sebesar 32,71%.

Sampai dengan Maret tahun 2019 telah terbit 2 (dua) Permendagri untuk segmen batas daerah antara Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur yaitu :

1. Permendagri Nomor 30 Tahun 2017 (Kabupaten Kutai Kartanegara - Kota Balikpapan);
2. Permendagri Nomor 31 Tahun 2017 (Kabupaten Kutai Kartanegara - Kabupaten Kutai Timur).

Di tahun yang sama jumlah segmen batas yang telah dilakukan pengajuan Permendagri pada batas daerah antara :

1. Kabupaten Kutai Kartanegara dengan Kabupaten Mahakam Ulu.
2. Kabupaten Kutai Kartanegara dengan Kota Samarinda.
3. Kabupaten Kutai Kartanegara dengan Penajam Paser Utara.
4. Kabupaten Mahakam Ulu Provinsi Kalimantan Timur dengan Kabupaten Kapuas Hulu Provinsi Kalimantan Barat.
5. Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur dengan Kabupaten Malinau Provinsi Kalimantan Utara.
6. Kabupaten Mahakam Ulu Provinsi Kalimantan Timur dengan Kabupaten Malinau Provinsi Kalimantan Utara.

Sampai dengan Maret tahun 2019 Provinsi Kalimantan Timur masih menyisakan 6 (enam) Segmen batas daerah yang belum selesai dengan Provinsi lain yaitu segmen batas antara :

- Provinsi Kalimantan Timur - Provinsi Sulawesi Barat yang merupakan batas laut yaitu pada ruas batas antara Kabupaten Paser dengan Kabupaten Mamuju;
- Provinsi Kalimantan Timur - Provinsi Kalimantan Tengah di ruas batas antara Kabupaten Kutai Barat dengan Kabupaten Barito Utara;
- Provinsi Kalimantan Timur – Provinsi Kalimantan Tengah di ruas batas antara Kabupaten Paser dengan Kabupaten Barito Utara;
- Provinsi Kalimantan Timur – Provinsi Kalimantan Tengah di ruas batas antara Kabupaten Mahakam Ulu dengan Kabupaten Murung Raya;
- Provinsi Kalimantan Timur - Provinsi Kalimantan Utara pada ruas batas antara Kabupaten Berau dengan Kabupaten Bulungan;
- Provinsi Kalimantan Timur – Provinsi Kalimantan Selatan di ruas batas antara Kabupaten Paser dengan Kabupaten Kotabaru.

Untuk batas Provinsi Kalimantan Timur dengan Provinsi Kalimantan Tengah sampai dengan Maret tahun 2019 khususnya pada segmen antara Kabupaten Mahakam Ulu dengan Kabupaten Murung Raya telah tercapai kesepakatan batas $\pm 229,29$ Km dan masih menyisakan $\pm 205,06$ Km panjang batas yang belum sepakat.

Sampai dengan Maret tahun 2019 telah dilakukan kegiatan verifikasi bersama Tim PBD Pusat untuk Proses draft Permendagri pada segmen batas antara Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur yaitu segmen batas antara :

- Kabupaten Kutai Kartanegara – Kota Samarinda;
- Kabupaten Kutai Kartanegara – Kabupaten Penajam Paser Utara;



Untuk batas daerah antara Kabupaten/Kota masih menyisakan 5 (lima) segmen batas wilayah yang belum selesai, yaitu :

- Kabupaten Kutai Kartanegara dengan Kabupaten Kutai Barat dengan panjang batas 148,83 Km yang belum sepakat;
- Kabupaten Kutai Barat – Kabupaten Paser dengan panjang batas 62,21 Km yang belum sepakat;
- Kabupaten Paser – Kabupaten Penajam Paser Utara dengan panjang batas 83,13 Km yang belum sepakat;
- Kabupaten Berau dengan Kabupaten Kutai Timur dengan panjang batas 372,68 Km yang belum sepakat;
- Kabupaten Kutai Barat dengan Kabupaten Mahakam Ulu dengan panjang batas 81,76 Km yang belum sepakat.

D. Pencegahan dan Penanggulangan Bencana

Pada wilayah Kalimantan Timur umumnya bencana berstatus lokal (terjadi di Kabupaten/Kota pada tahun 2018 tidak ada pernyataan Bupati/Walikota), bencana yang terjadi di Kabupaten/Kota dapat diatasi dengan melibatkan Perangkat Daerah terkait, lembaga dunia usaha dan masyarakat/LSM. Selama tahun 2018 telah terjadi sebanyak 371 kejadian bencana berdasarkan data Pusdalops BPBD Provinsi Kalimantan Timur.

Berdasarkan data Pusat Pengendalian Operasional (Pusdalops) BPBD Provinsi Kalimantan Timur selama tahun 2018 telah terjadi 371 kejadian yaitu kebakaran pemukiman, hutan dan lahan (322), angin puting beliung (10), banjir (30), tanah longsor (38), Kecelakaan Transportasi Lintas, Udara, Laut, Sungai (16), lain-lain (61).

E. Pengelolaan Kawasan Khusus

Berdasarkan Perda Provinsi Kalimantan Timur No. 1 Tahun 2016 bahwa Wilayah Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Timur mencakup perencanaan seluruh wilayah administrasi Provinsi Kalimantan Timur yang meliputi daratan seluas kurang lebih 12.734.691,75 Ha, dengan luas wilayah administrasi Provinsi Kalimantan Timur 16.732.065,18 Ha.

Pertumbuhan Kaltim Hijau yang Berkeadilan dan Berkelanjutan menetapkan 8 Kawasan 8 kawasan unggulan Kalimantan Timur :

1. Kawasan Industri Kariangau dan Buluminung, di Kota Balikpapan dan Kabupaten Penajam Paser Utara
2. Kawasan Industri Perdagangan dan jasa di Kota Samarinda
3. Kawasan Industri Gas dan Kondensat di Kota Bontang
4. Kawasan Industri dan Pelabuhan Internasional (KIPI) Maloy di Kabupaten Kutai Timur
5. Kawasan Industri Pariwisata, Kepulauan Derawan di Kabupaten Berau.
6. Kawasan Industri Pertanian di Kabupaten Paser dan Kabupaten Penajam Paser Utara.
7. Kawasan Industri Pertanian di Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kabupaten Kutai Barat.
8. Kawasan Strategis Perbatasan di Kabupaten Mahakam Ulu

F. Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum

Kondisi ketertiban dan keamanan di Provinsi Kalimantan Timur sampai dengan tahun 2018 sebagai berikut :

- a. Presentase penyelenggaraan trantibum tahun 2018 sebagai berikut:
 1. Pelaksanaan Pengamanan Aset sebanyak 6 kali.



2. Pelaksanaan pengaman unjuk rasa sebanyak 6 kali, pengaman unjuk rasa hanya dilakukan di Sekretariat Daerah Prov. Kaltim
 3. Melaksanakan pengamanan Protoker, Pejabat VVIP dan VIP sebanyak 8 kali, pelaksanaan pengamanan pejabat tergantung jadwal kegiatan pejabat Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur.
 4. Inventarisasi Perda, Perkada dan PPNS 3 kali untuk pelaksanaan kegiatan inventarisasi Perda.
- b. Persentase Kegiatan pengaturan, pengawalan dan penjagaan sebagai berikut:
1. Melaksanakan operasional patrol wilayah Kabupaten/Kota se Kalimantan Timur sebanyak 150 kali.
 2. Melaksanakan Pos Pengaman sebanyak 12 bulan atau 360 hari dalam setahun, ini merupakan kegiatan rutinitas yang dilakukan penjagaan secara bergantian per regu.

VI. PENUTUP

Pada kesempatan yang baik ini, Saya atas nama Gubernur Kalimantan Timur memberikan apresiasi dan terima kasih yang sebesar-besarnya :

1. Kepada Bupati/Walikota beserta jajaran Pemerintah Kabupaten/Kota, yang telah bekerjasama didalam mensinkronisasikan visi, misi dan program/kegiatan pembangunannya serta melaksanakannya dengan baik dan benar sesuai peraturan perundang-undangan, sehingga hasil pembangunan dapat dirasakan dan bermanfaat bagi masyarakat di Kabupaten/Kota.
2. Kepada Pimpinan Perangkat Daerah dan staf di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, atas kinerja dan prestasi yang telah dicapai dan untuk itu agar terus dipertahankan dan ditingkatkan untuk memberikan layanan yang terbaik bagi masyarakat serta melaksanakan tupoksinya dengan kerja keras, jujur, dan ikhlas semata-mata untuk kepentingan masyarakat.
3. Kepada seluruh stake holders dan publik, atas partisipasi dan dukungannya didalam menciptakan situasi dan kondisi Kalimantan Timur yang aman dan damai sehingga pelaksanaan program/kegiatan pembangunan dapat berjalan lancar sebagaimana mestinya. Termasuk atas masukan dan kritikan yang membangun atas pelaksanaan program/kegiatan pembangunan selama ini.

Langkah strategis dan prioritas program/kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan selanjutnya dituangkan dalam RPJMD Kalimantan Timur Tahun 2018-2023 dengan visi "Berani Untuk Kalimantan Timur Yang Berdaulat". Dalam RPJMD Tahun 2019-2023 akan dilanjutkan dan dituntaskan program/kegiatan pembangunan yang belum terselesaikan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

InsyAllah dengan membangun kebersamaan, kekompakan dan sinergitas bersama, maka dapat kita wujudkan Provinsi Kalimantan Timur sebagai Island of Integrity yang penyelenggaraan Pemerintahannya terus meningkatkan kinerja dan prestasinya yang terbebas dari praktik-praktik korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN), serta penyelenggaraan Pembangunannya, hasilnya dapat merata, adil dan mensejahterakan masyarakat Kalimantan Timur. Perwujudan penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) di Provinsi Kalimantan Timur dapat kita wujudkan bersama.

Mengakhiri LPPD ini, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya dan terima kasih yang tak terhingga kepada seluruh komponen kepentingan dan masyarakat Provinsi Kalimantan Timur



sehingga situasi dan kondisi tetap terjaga kondusif sehingga penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan dapat berjalan tertib, lancar dan sukses. Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur membuka selebar-lebarnya kepada publik untuk memberikan masukan, saran dan kritiknya guna suksesnya penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan di Provinsi Kalimantan Timur.

Sekian dan terima kasih.
Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Samarinda, November 2019

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

DR. Ir. H. ISRAN NOOR, M.Si